

KERUKUNAN KELUARGA SULAWESI SELATAN (KKSS) SEBAGAI FORUM KOMUNIKASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ETNIS DI KOTA PALU

KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) as a Forum for Communication in the Resolution of Ethnic Conflict in the City of Palu

Sitti Murni Kaddi*
Alimuddin Unde, Dwia A. Palubuhu*****

*Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Univ. Tadulako **Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP
Univ. Hasanuddin, ***Jurusan Sosiologi Fisip Univ. Hasanuddin

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui fungsi KKSS sebagai forum komunikasi dalam penyelesaian konflik etnis di kota Palu, 2) faktor-faktor yang mendukung dan menghambat KKSS sebagai forum komunikasi dalam penyelesaian konflik etnis di kota Palu. Pengumpulan data digunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan diskusi kelompok berfokus. Selanjutnya data yang didapat dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian konflik antara Bugis dan Kaili di kota Palu, KKSS cabang kota Palu menggunakan komunikasi kelompok dan komunikasi antarpribadi. Selain itu peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian konflik Bugis dan Kaili juga sangat berpengaruh. Hambatan yang dihadapi KKSS cabang kota Palu dapat diatasi dengan terjalannya komunikasi yang baik antara pengurus, pemerintah dan tokoh masyarakat Bugis maupun tokoh masyarakat Kaili.

Kata kunci: KKSS, forum komunikasi, resolusi, konflik etnis

ABSTRACT

This study aims to: 1) understanding the function of KKSS as a forum for communication in the resolution of ethnic conflicts of Bugis and Kaili in Palu city, 2) understanding the factors that support and inhibit KKSS as a forum of communication in the resolution of ethnic conflicts of Bugis and Kaili in Palu city. Data collection used interviews, observation, documentation and Focus Group Discussion (FGD). The data was analysed using descriptive qualitative analysis techniques. The result showed that in the resolution of the conflict between Bugis and Kaili in Palu, KKSS Palu used group communication and interpersonal communication. In addition, the role of community leaders in resolving the conflict of Bugis-Kaili is also very influential. Barriers that is faced by the KKSS of Palu can be overcome by good communications between KKSS committee, local government and community leaders of Bugis and Kaili.

Key words: KKSS, forum communication, resolution, ethnic conflict,

Latar belakang

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan beraneka macam budaya dan etnis yang ada. Kebudayaan dan etnis ini dapat dipandang dalam dua sisi yang berbeda, yakni; kekayaan budaya dan etnis sebagai anugerah yang memperkaya keberagaman masyarakat, serta nilai dari kearifan lokal yang dimiliki masing-masing. Namun secara berlawanan, keberagaman etnis dan budaya dapat

menghambat berbagai pembangunan sebab ada pelabelan di masyarakat berbeda budaya dan etnis berarti berbeda juga latar belakang, berbeda pola pikir, tingkah laku dan tentunya akan berbeda cara berkomunikasi.

Di Indonesia tidak ada larangan bahwa sebuah provinsi atau daerah menutup pintu masuk etnis yang lain, sepanjang etnis-etnis tersebut mampu bersosialisasi, berdampingan, berko-

munikasi, hidup rukun dan damai dengan etnis yang lain, termasuk etnis Bugis dan etnis yang lainnya.

Di seluruh Nusantara dapat di jumpai etnis Bugis yang sibuk dengan aktivitas pelayaran, perdagangan, pertanian, pembukaan lahan perkebunan di hutan atau pekerjaan apa saja yang dianggap sesuai dengan kondisi ruang dan waktu.

Selain sifatnya yang saling berlawanan, tetapi memiliki dinamika mobilitas yang tinggi, etnis Bugis juga memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Oleh karena itu etnis Bugis cenderung lebih sukses di dibandingkan dengan etnis lain. Kalau diperhatikan keadaan mereka di berbagai daerah dalam wilayah Republik, tampak kemampuan etnis Bugis untuk meraih posisi-posisi penting diberbagai bidang kehidupan, terutama dibidang politik dan pemerintahan serta bidang ekonomi dan perdagangan. Karena itu, di berbagai daerah sering dijumpai etnis Bugis mampu menguasai segala bidang.

Sejak zaman dahulu, etnis Bugis memang sudah kental dengan sifat perantau. Di perantauan, etnis ini terkenal punya semangat juang dan semangat hidup lebih besar.

Satu hal yang membuat etnis Bugis bisa diterima di mana-mana dan akhirnya cukup mencolok jika sudah berhasil di perantauan karena etnis Bugis punya semboyan dan prinsip hidup adalah “dimana tanah dipijak disitu langit di junjung”.

Disamping semboyan tersebut di atas masih ada lagi semboyan yang dimiliki orang-orang Bugis, seperti, “*Resopa temmangingi, matinulu, namalomo naletei pammase Dewata sewwa-E.*” “Rahmat berupa kesejahteraan dari Tuhan Yang Maha Esa hanya bisa diraih melalui kerja keras, gigih, dan ulet”.

Bagi etnis Bugis, semangat kerja keras yang biasa dilafalkan sebagai *makkareso* tidak hanya diwujudkan dalam bentuk bekerja ulet di tanah kelahiran atau di kampung asal. Guna bertahan hidup, di

mana saja, semangat itu dikobarkan. Salah satu karakter yang terkenal juga dari etnis Bugis adalah wataknya yang keras dan gigih dalam hal prinsip hidup di manapun etnis ini berada. Tapi, kalau telah mengenal jiwa dan wataknya atau adat-istiadatnya, maka tengah berhadapan dengan suku bangsa yang peramah, sopan santun dalam berkomunikasi, bahkan kalau perlu rela mengeluarkan segala isi hatinya bahkan jiwanya sekalipun kepada orang lain yang sama-sama berada di perantauan.

Kota Palu adalah salah satu kota yang penduduknya terdiri dari beragam etnis dan budaya di Indonesia. Proporsi jumlah penduduk pendatang dan penduduk asli relatif berimbang sehingga dinamika persaingan antar etnis cukup besar baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik, sehingga hal ini bisa menimbulkan konflik dan bisa meluas menjadi konflik kekerasan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan suatu etnis ketika berada ditengah etnis lain kemungkinan akan menimbulkan suatu ketidaksenangan. Dari ketidaksenangan tersebut biasanya akan memicu terjadinya suatu konflik. Munculnya masyarakat yang beretnis Bugis di kota Palu dengan sendirinya melahirkan semangat kompetensi yang cukup tajam. Bahkan berakibat pada munculnya pengelompokan pemukiman, misalnya di daerah Palu Selatan dan Palu Barat dominan dihuni etnis Bugis yang berprofesi pedagang, bahkan menguasai bidang perekonomian dalam hal ini Pasar Inpres, dan Pasar Masomba. Sedangkan wilayah Palu Timur umumnya didominasi oleh etnis Kaili sebagai penduduk asli yang bermata pencaharian pengrajin, tukang batu dan kusir dokar.

Berbeda dengan etnis Bugis, masyarakat Kaili pada umumnya hanya memilih bekerja sebagai pedagang sayur tradisional. Akibatnya, secara ekonomi etnis ini kurang memiliki akses yang memadai untuk meningkatkan pendapatan yang dapat menambah tingkat kesejahteraannya. Perbedaan seperti ini

semakin memposisikan kedua suku yang berbeda pada kutub yang berjauhan. (Nukma, 2005)

Dalam beberapa tahun terakhir ini, peristiwa konflik semakin marak terjadi di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di kota Palu. Salah satu penyebab disinyalir terutama pada masa-masa terakhir ini adalah fenomena perbedaan etnis menjadi salah satu hal pemicu terjadinya konflik antar kelompok. Kelompok atau etnis tertentu terlibat konflik kekerasan dengan kelompok lain yang kebetulan berbeda etnis dan agama, atau bahkan satu agama tapi berbeda aliran. Dan hal ini juga terjadi di kota Palu. Dalam kerusuhan di tahun 1998 dan 2002 yang menyebabkan terbakarnya pasar Inpres dan pasar Masomba dikarenakan serangan kelompok dari suku Kaili. Mereka keberatan karena sektor perdagangan semuanya dikuasai oleh masyarakat Bugis. (Nukma, 2005)

Kata konflik bukan kata baru lagi dalam masyarakat. Pemahaman masyarakat tentang apa itu konflik adalah terjadinya suatu pertengkaran, kekerasan, atau peperangan.

Pertumbuhan konflik dalam proses komunikasi, terjadi akibat pelemparan pesan yang tidak memuaskan antara komunikan dan komunikator. Konflik memiliki tiga komponen integral, yaitu situasi, sikap dan perilaku.

Konflik sebenarnya adalah suatu situasi yang terjadi manakala terjadi perbedaan, tumpang tindih kepentingan dan kehendak. Perbedaan yang terjadi bisa saja sangat bertolak belakang atau berlawanan sehingga menimbulkan bentrokan, atau sekedar perbedaan arah yang dalam hal ini adanya kesalahpahaman.

Dalam menyelesaikan suatu konflik, dibutuhkan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk berkomunikasi dengan pihak yang berkonflik dengan menyatakan keinginannya untuk mengakhiri konflik tersebut. Menyelesaikan suatu konflik adalah bagian dari proses komunikasi.

Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang disingkat KKSS merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang menghimpun Warga Sulawesi Selatan yang berada di perantauan di luar provinsi Sulawesi Selatan, yang salah satunya berkedudukan di kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu tujuan didirikan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan ini adalah menciptakan hubungan kekeluargaan, persaudaraan, kebersamaan dan harmonisasi, serta mempererat kerjasama diantara anggota-anggotanya dan masyarakat dimana KKSS berada atau berdomisili di kota Palu.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi KKSS sebagai forum komunikasi dalam penyelesaian konflik etnis Bugis dan Kaili di kota Palu?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat KKSS sebagai forum komunikasi dalam penyelesaian konflik etnis Bugis dan Kaili di kota Palu?

Kajian Konsep dan Teori

Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin “communication” yang bersumber dari kata “communis” yang berarti “sama” dalam hal ini berarti “sama makna”. Dengan demikian, komunikasi langsung dapat terjadi apabila pesan yang disampaikan oleh seseorang dimengerti oleh orang lain yang dijadikan sasarannya (Effendi, 1988:56)

Everett M. Rogers seorang pakar sosiologi pedesaan Amerika dalam Cangara (2003:19) membuat definisi komunikasi bahwa: “Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka”

Dalam kehidupan organisasi, komunikasi memiliki beberapa fungsi. Menurut Tubbs (2001:170) komunikasi dalam organisasi memiliki tiga fungsi, yaitu:

1. Fungsi perintah, komunikasi memperbolehkan anggota membicarakan, menerima, menafsirkan dan bertindak atas suatu perintah. Dua jenis komunikasi yang mendukung
2. Pelaksanaan fungsi ini adalah pengarahan dan umpan balik, tujuannya adalah berhasil mempengaruhi anggota lain dalam organisasi. Hasil dari fungsi ini adalah koordinasi diantara sejumlah anggota yang saling tergantung dalam organisasi tersebut.
3. Fungsi relasional, komunikasi memperbolehkan anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan bisnis produktif dan hubungan personal dengan anggota lain. Hubungan dalam pekerjaan mempengaruhi organisasi (*job performance*) dalam berbagai cara kerja, misalnya: kepuasan kerja, disiplin kerja, aliran komunikasi ke bawah maupun ke atas, hierarki organisasional, dan pelaksanaan perintah.
4. Fungsi manajemen ambigu, pilihan dalam situasi organisasi sering dibuat dalam keadaan yang sangat ambigu. Misalnya, motivasi berganda muncul karena pilihan yang diambil akan mempengaruhi rekan kerja dan organisasi. Komunikasi adalah alat untuk mengatasi dan mengurangi ketidakjelasan (*ambiguitas*) yang melekat dalam organisasi: anggota berbicara satu dengan yang lainnya untuk membangun lingkungan dan memahami situasi baru yang membutuhkan perolehan situasi bersama.

Penjabaran fungsi komunikasi dalam organisasi di atas menunjukkan bahwa keberadaan komunikasi mendukung dan menjadi sarana setiap kegiatan organisasi. Komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi akan membentuk suatu iklim komunikasi organisasi.

Menurut Redding dan Sanborn dalam Muhammad (2002:65) memberikan definisi komunikasi organisasi sebagai berikut: "Komunikasi organisasi adalah

pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks".

Sedangkan menurut Katz dan Kahn masih dalam Muhammad (2002:65) definisi komunikasi organisasi adalah: "Komunikasi organisasi adalah arus informasi, pertukaran informasi dan pemindahan arti di dalam suatu organisasi".

Istilah konflik berasal dari bahasa Latin, "*Com*" yang berarti "bersama" dan "*Fligere*" yang berarti melanggar, menabrak, menemukan, membentur. Dengan demikian, konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain, karena beberapa alasan. Dalam hal ini, "pertikaian" menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu maupun kelompok.

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1977), konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.
<http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk melukiskan dan menggambarkan secara sistematis fakta dan fenomena berkaitan KKSS sebagai forum komunikasi dalam penyelesaian konflik etnis Bugis-Kaili di kota Palu. Dengan mengumpulkan informasi aktual yang menggambarkan gejala yang ada, kemudian mengidentifikasi masalah yang

ada dan memeriksa kondisi dan praktek yang berlaku.

Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam (*In-depth Interview*), dokumentasi, observasi, dan Focus Group Discussion. Informan dalam penelitian ini sebanyak 16 orang yang terdiri dari informan kunci, informan, dan informan pendukung.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Fungsi KKSS sebagai forum komunikasi

Diperlukan beberapa tahapan yang dilakukan oleh Badan Pengurus Cabang KKSS Kota Palu dalam penyelesaian konflik etnis Bugis Kaili di Kota Palu. Dalam hal ini adalah melalui komunikasi kelompok dan komunikasi antarpribadi.

a. Komunikasi Kelompok

Dalam penyelesaian konflik etnis Bugis Kaili ini Badan Pengurus Cabang Kota Palu melakukan komunikasi kelompok dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka penyelesaian konflik yang terjadi. Orang-orang yang terlibat dalam kelompok pemecahan masalah, bekerja bersama-sama untuk mengatasi persoalan bersama yang di hadapi.

Dalam operasionalisasinya kelompok pemecahan masalah ini melibatkan dua aktivitas penting. Pertama pengumpulan informasi, bagaimana suatu kelompok sebelum membuat keputusan, berusaha mengumpulkan informasi yang penting dan berguna untuk landasan pengambilan keputusan tersebut. Dan kedua adalah pembuatan keputusan atau kebijakan itu sendiri yang berdasar pada hasil pengumpulan informasi.

Dalam hal penyelesaian konflik biasanya KKSS Cabang Kota Palu berusaha mengkomunikasikan, dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat, baik itu tokoh masyarakat dari Kaili maupun tokoh dari masyarakat Bugis.

Konflik-konflik yang pernah terjadi di Kota Palu umumnya yang membuat permasalahan adalah mereka kaum migran

yang baru datang dan mencoba mengadu nasib di Kota Palu. Biasanya pendatang yang telah membuat masalah ini melarikan diri atau ketika pemasalahan sudah selesai pihak KKSS memulangkannya ke daerah asal.

Hal ini sesuai dengan yang tercantum di Anggaran Rumah Tangga (Pedoman Kerja Kerja KKSS, 2009-2014:107) yang salah satu bunyinya mengatakan bahwa pemberhentian anggota apabila melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik organisasi baik ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan maupun keputusan dan peraturan organisasi.

b. Komunikasi Antarpribadi

Dalam penyelesaian konflik etnis Bugis Kaili, KKSS Cabang Kota Palu melakukan pendekatan komunikasi antarpribadi baik dengan anggota KKSS sendiri maupun dengan etnis lokal. Menjaga kontak pribadi yang akrab tanpa menumbuhkan perasaan bermusuhan merupakan salah satu kunci keberhasilan hubungan antarpribadi.

Komunikasi antarpribadi merupakan komunikasi yang penting dalam penyelesaian konflik, bagaimana mengadakan pendekatan secara kekeluargaan, berempati bukan hanya kepada warga KKSS, tetapi yang lebih penting adalah dengan etnis lokal. Dengan demikian diharapkan konflik yang pernah terjadi meskipun awalnya pribadi-pribadi tidak berlangsung lama, dan komunikasi dengan etnis lokal tetap terjaga dengan baik. Untuk mendukung komunikasi antara etnis Bugis dengan Kaili KKSS mengadakan penyuluhan hukum, dan penyuluhan ini bukan hanya diperuntukkan untuk etnis Bugis tapi juga etnis Kaili dengan mendatangkan, Jaksa dan Kepolisian untuk memberikan materi di pasar-pasar yang ada di Kota Palu.

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat KKSS sebagai forum komunikasi dalam penyelesaian konflik etnis Bugis Kaili di kota Palu

a. Factor yang mendukung

- Meskipun sifatnya organisasi paguyuban tetapi di sisi lain KKSS Cabang Kota Palu juga merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Secara otomatis hal ini dapat menjadi sebuah kekuatan yang dimiliki dalam menyelesaikan sebuah masalah termasuk penyelesaian konflik antar etnis Bugis Kaili.
- Untuk mewujudkan salah satu misi KKSS Cabang kota Palu yaitu menumbuhkan sifat dimana bumi di pijak disitu langit di junjung, maka KKSS Cabang kota Palu menjalin dan membina hubungan dengan pemerintah setempat. Dengan adanya hubungan baik ini diharapkan menjadi kekuatan untuk melaksanakan programnya.
- Kehadiran masyarakat Sulawesi Selatan di kota Palu bukan hanya menguasai bidang ekonomi tetapi boleh juga dikatakan bahwa menguasai bidang pemerintahan. Hal ini dapat di buktikan ketika masuk di setiap kantor pemerintahan maka di situ dapat ditemukan masyarakat Sulawesi Selatan atau warga KKSS khususnya etnis Bugis. Ini membuktikan bahwa di setiap sektor atau lini ada etnis Bugis.
- Kehadiran KKSS sebagai sebuah organisasi paguyuban mampu menciptakan hubungan yang harmonis baik secara internal maupun eksternal. Komunikasi yang terjalin dengan baik diantara para pengurus tentu akan memberikan efek positif dalam penyelesaian konflik yang terjadi.
- *Nosarara Nosabatutu* adalah kata yang berasal dari bahasa Kaili yang artinya Bersaudara dan Bersatu, yang dijadikan simbol yang mewadahi kemajemukan masyarakat kota Palu. *Nosarara Nosabatutu* dimunculkan sebagai sebuah alternatif didalam memecahkan berbagai persoalan kehidupan sosial masyarakat Kota Palu. Falsafah ini

diharapkan memiliki makna dan fungsi strategis didalam menjembatani sekat-sekat perbedaan, baik fungsi sosial budaya, politik, maupun ekonomi. Komunikasi memegang fungsi penting dalam penyampaian pesan-pesan yang terkait dengan aktifitas manusia dan merupakan proses membagi ide melalui tanda-tanda yang mengandung informasi untuk dipahami bersama. Komunikasi adalah proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya. Tujuannya adalah untuk membangun kesamaan makna.

- Dalam kaitannya dengan penanganan penyelesaian konflik, peran komunikasi sangat penting yang menghubungkan antara kepentingan individu, organisasi dengan sektor publik lainnya.
- KKSS Cabang Kota Palu, berusaha melibatkan tokoh masyarakat dalam hal penanganan penyelesaian konflik.

b. Faktor penghambat

- Belum adanya struktur organisasi yang jelas
- Belum adanya sekretariat KKSS Cabang Kota Palu yang paten
- Etnosentrisme etnis Bugis terlalu tinggi
- Penguasaan etnis Bugis dalam ruang-ruang ekonomi di Kota Palu

3. Faktor-Faktor Lain Yang Dapat Mem-bantu Upaya Penyelesaian Konflik Et-nis Bugis-Kaili di Kota Palu

Sesuai dengan temuan lapangan, selain fungsi KKSS Cabang kota Palu, terdapat peran institusi informal melalui tokoh masyarakat dalam proses penyelesaian konflik antara etnis Bugis Kaili yang terjadi pada tahun 2001 yang lalu.

Pemuka pendapat (*opinion leader*) sangat berperan dalam mendorong penyelesaian yang disinyalir konflik antara etnis Bugis Kaili di kota Palu

Pada beberapa wilayah yang berada dalam situasi konflik, keberadaan tokoh masyarakat sebagai penengah umumnya lebih efektif daripada aparat keamanan dan pemerintah, hal ini disebabkan karena para tokoh tersebut relatif lebih bebas dari pengaruh kepentingan dan adanya penyelesaian konflik yang dianggap tidak memihak

Di samping itu pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kerukunan nasional, dan melestarikan nilai sosial budaya dalam

Pemerintah kota Palu dengan visinya “Kota Untuk Semua” dan dengan dicanangkan Kota Palu sebagai “*Nosarara Nosabatutu*” yang artinya Bersaudara dan Bersatu yang dijadikan simbol yang mewadahi kemajemukan masyarakat kota Palu

Pencarian sebuah ungkapan yang dapat digunakan sebagai simbol pemersatu Kota Palu memang telah lama dilakukan. Dinamika etnisitas, persoalan konflik kekerasan antar etnik dan agama, perkelahian antar kampung yang berlatar belakang historis terkait dengan sejarah kerajaan yang sering melanda Kota Palu menjadi alasan kuat untuk menemukan sebuah konsep atau falsafah yang dapat dijadikan sebagai simbol pluralitas dan multikulturisme.

Konflik kekerasan yang pernah terjadi pada akses ekonomi di Pasar Manonda, Inpres dan Pasar Tua selalu diiringi dengan isu etnik dan agama. Perkelahian antara kelurahan Nunu dengan Tavanjuka, Kayumalue dengan Taipa meskipun tanpa disertai isu etnik dan agama tetapi persoalan historis dan ketersinggungan bahkan hanya karena persoalan kalah pertandingan sepak bola bisa berubah menjadi pertumpahan darah. (Ilyas Lampe, 2010)

Lahirnya falsafah yang kemudian menjadi ikon kota Palu ini, juga tidak terlepas dari perdebatan panjang dikalangan masyarakat awam bahkan pada tingkat elit. Konsep *Nosarara Nosabatutu*

pada dasarnya merupakan sebuah istilah yang dianggap berasal dari etnik Kaili sub etnik Ledo yang kebetulan memiliki banyak tokoh yang berada pada posisi pengambil kebijakan sehingga memuluskan falsafah ini ditetapkan sebagai ikon kota Palu.

Secara sosiokultural kata *Nosarara Nosabatutu* dapat diterjemahkan sebagai satu ikatan kekeluargaan baik karena ikatan hubungan darah atau karena ikatan perkawinan dalam satu komunitas yang memiliki sarana bersama untuk kepentingan dan kebutuhan komunitasnya tanpa membedakan akar asal-usulnya.

Pendapat lain dari Juraid Abd. Latif (Haliadi, 2008:124) mengartikan bahwa *Nosarara Nosabatutu* adalah sebuah simbol atau konsep yang diacu dalam kehidupan tanpa memandang perbedaan (kita semua bersaudara). Artinya ketika *Nosarara Nosabatutu* dijadikan sebagai sistem maka persoalitas, sikap dan tindak tanduk harus tunduk dan taat asas. Misalnya pada aspek ekonomi, konsep ini dapat berperan dalam membangun sistem ekonomi komunal (bersatu dalam mengisi pundi-pundi) sebab dengan konsep satu dalam kebersamaan menjadi modal dalam membangun perekonomian yang pada gilirannya dapat melahirkan kesejahteraan (*batutu*).

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anggota KKSS yang ada di Sulawesi Tengah khususnya kota Palu, ketika terjadi konflik antara Bugis dengan Kaili pihak pengurus KKSS Cabang kota Palu merasa bertanggung jawab dalam menyelesaikan, memberikan perlindungan hukum dan pembelaan kepada anggota yang memerlukannya baik itu ada laporan dari anggota KKSS maupun tidak adanya anggota KKSS yang melapor, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang mengatakan bahwa anggota Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan berhak memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi, berhak memperoleh pelayanan, pembelaan, pendidikan dan

bimbingan dari organisasi. (Pedoman Kerja Kerja KKSS, 2009-2014:106-114)

Dalam penyelesaian konflik yang lalu, KKSS langsung mengundang pemerintah, tokoh Kaili, tokoh Bugis, dan kemudian mengadakan pertemuan sampai konflik di anggap reda. Dan pada saat itu juga KKSS langsung membentuk satu forum komunikasi yang diberi nama Forum Komunikasi Antar Kawasan Manonda

Dalam menyelesaikan konflik yang mengarah ke etnis KKSS Cabang kota Palu dan tokoh masyarakat menggunakan komunikasi kelompok dan komunikasi antarpribadi.

Khusus dalam penyelesaian konflik antara etnis Bugis Kaili di kota Palu fungsi dari komunikasi kelompok ini adalah sebagai pemecahan masalah yang terjadi. Tujuan dari komunikasi kelompok sebagai pemecahan masalah adalah sebagai mana tujuan komunikasi pada umumnya adalah untuk mendapatkan dan berbagi informasi, saling menjelaskan dan saling mempengaruhi. (Sendjaja,1994: 102)

Setelah berbagi informasi maka selanjutnya KKSS Cabang Kota Palu setelah duduk bersama-sama dengan pihak etnis Kaili dalam hal penyelesaian konflik yang terjadi, selanjutnya KKSS Cabang Kota Palu ataupun tokoh masyarakat yang mewakili etnis Kaili, maka dilanjutkan dengan memersuasi, saling meng-hargai, agar tercipta salingkepengertian antara yang satu dengan yang lainnya,

Selanjutnya pihak KKSS Cabang kota Palu juga melakukan komunikasi antar pribadi dengan etnis yang mewakili Kaili dan juga komunikasi antarpribadi dilakukan juga dengan masyarakat Kaili setelah konflik di anggap mulai reda. Komunikator yang melakukan komunikasi antarpribadi dalam hal ini pengurus cabang KKSS kota Palu atau tokoh masyarakat yang ditunjuk merupakan pihak yang kredibel karena memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi dan diharapkan mampu memersuasi dan mampu membangun

komunikasi dengan pihak-pihak yang mewakili etnis Kaili.

Pada kegiatan komunikasi Antarpribadi dalam penyelesaian konflik yang mengarah ke etnis yang terjadi tahun 2001 lalu di pasar Masomba, dan pasar Inpres maupun konflik-konflik yang pernah terjadi di Kota Palu, baik dari KKSS Cabang Kota Palu maupun dari pihak tokoh masyarakat mengadakan pendekatan humanistik untuk efektifnya komunikasi antarpribadi.

Aspek penting lain dalam penyelesaian konflik etnis Bugis Kaili inilah perlunya persuasi terhadap tokoh masyarakat Kaili, sebagai wakil dari etnis Kaili yang berkonflik. Persuasi dapat dilakukan secara rasional dan emosional. Dengan cara rasional komponen kognitif pada diri seseorang dapat dipengaruhi. Aspek yang dapat dipengaruhi berupa ide ataupun konsep. Komunikasi persuasif adalah suatu proses, yakni proses mempengaruhi sikap, pendapat dan perilaku orang lain baik secara verbal maupun non verbal.

Dalam penyelesaian konflik yang pernah terjadi di kota Palu khususnya konflik antar Bugis Kaili, KKSS Cabang Kota Palu melakukan pendekatan komunikasi antarpribadi di antara kedua belah pihak yang berkonflik. Dimana pihak Pengurus KKSS berusaha menjadi mediator konflik. Dalam komunikasi antarpribadi ini pihak pengurus KKSS, berempati terhadap yang berkonflik baik dari pihak Kaili maupun dari pihak Bugis.

Penanganan penyelesaian konflik etnis Bugis Kaili apabila tidak diatasi dengan baik bisa saja berlanjut dan akan menjadi konflik yang terus berkelanjutan. Sebagai suatu organisasi meskipun sifatnya paguyuban yang menghimpun warga atau anggotanya khusus kota Palu, maka selayaknya KKSS Cabang Kota Palu dituntut untuk mampu dan secara proaktif dalam menghadapi, melindungi, dan bertanggung jawab terhadap warganya atau anggotanya ketika terjadi konflik. Namun KKSS Cabang Kota Palu masih

memiliki banyak keterbatasan dalam penyelesaian konflik yang terjadi.

KKSS Cabang Kota Palu menghadapi beberapa kendala berupa kelemahan-kelemahan secara internal dan ancaman secara eksternal. Ancaman dan kelemahan tersebut merupakan faktor yang dapat menghambat proses penyelesaian konflik etnis Bugis Kaili dari KKSS Cabang Kota Palu.

Dalam hal penyelesaian konflik etnis, KKSS dihadapkan pada beberapa ancaman dalam organisasi sendiri. Belum adanya sekretariat yang paten setelah kebakaran pasar yang turut menghancurkan sekretariat KKSS Cabang Kota Palu dengan sendirinya tentu akan menyebabkan KKSS tidak bisa melaksanakan fungsinya secara maksimal. Hal ini dapat diimbangi dengan adanya komunikasi yang terjalin dengan baik diantara sesama pengurus. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pengurus dan dengan pihak pemerintah setempat tentunya akan memberikan efek yang positif dalam rangka penyelesaian konflik yang terjadi.

KKSS Cabang Kota Palu melibatkan tokoh masyarakat dalam penanganan penyelesaian konflik yang terjadi antara Bugis dengan Kaili. Dalam penyelesaian konflik apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat maka kemungkinan konflik akan melebar dan meluas. Hal ini jelas akan merugikan semua pihak. Ini dapat diatasi dengan jalan penanganan yang cepat dan tepat melalui komunikasi yang tepat pula.

Dalam penanganan penyelesaian konflik dapat diantisipasi dengan melalui hubungan kerjasama yang baik dengan pemerintahan dan tokoh masyarakat Kaili. Misi KKSS Cabang kota Palu yaitu menumbuhkan sifat *dimana bumi di pijak disitu langit di junjung*, maka KKSS Cabang kota Palu menjalin dan membina hubungan dengan pemerintah setempat dan tokoh masyarakat Kaili. Dengan adanya hubungan baik dan melibatkan tokoh masyarakat antara kedua etnis ini

diharapkan menjadi kekuatan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi khususnya etni Bugis Kaili.

Adanya pengurus, warga atau anggota KKSS Cabang kota Palu yang juga menduduki posisi di pemerintahan akan sangat mendukung proses penyelesaian konflik yang terjadi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal penyelesaian konflik KKSS Cabang Kota Palu lebih kepada penyelesaian yang sifatnya secara kekeluargaan dan dilakukan melalui komunikasi kelompok dan komunikasi antar pribadi dengan pihak-pihak yang terkait. Khusus dalam penyelesaian konflik antara etnis Bugis Kaili di kota Palu, fungsi komunikasi kelompok ini adalah sebagai pemecahan masalah yang terjadi antara kedua etnis ini. Selanjutnya KKSS Cabang Kota Palu juga melakukan komunikasi antarpribadi dengan etnis Kaili setelah konflik dianggap reda. Dalam kegiatan komunikasi antarpribadi ini, KKSS Cabang Kota Palu berusaha melakukan pendekatan humanistik dengan etnis Kaili, melalui, keterbukaan, empati, sikap mendukung, kesetaraan, .
2. Kelemahan maupun keterbatasan KKSS cabang kota Palu ini dapat diatasi dengan mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai pihak maupun instansi terkait terlebih kepada tokoh masyarakat baik tokoh masyarakat Kaili maupun tokoh masyarakat Bugis. Dalam menyelesaikan konflik di kota Palu , di samping fungsi KKSS Cabang Kota Palu peran tokoh masyarakat juga sangat berpengaruh baik tokoh masyarakat dari pihak Bugis maupun dari pihak Kaili.

Daftar Rujukan

- Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. 2009. *Pedoman Kerja KKSS Masa Bakti 2009-2014*: Jakarta
- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Lampe, Ilyas. 2011. *Konflik di Kota Palu: Potret Perebutan Ruang Ekonomi*: P4K Universitas Tadulako
- Mamar, Sulaiman, dkk. 2003. *Model Pengelolaan Konflik Sosial Politik Pada Daerah Rawan Di Propinsi Sulawesi Tengah, Palu*. Laporan Riset Unggulan Terpadu Kementerian Ristek dan LIPI
- Moleong & Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nukma, Nursiah. 2005. *Konflik Dalam Relasi Sosial: Studi Kasus Migran Suku Bugis Dengan Suku Kaili Di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Sulawesi Tengah*. Tesis Magister, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.